BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian yang dilakukan mengenai Bagaimana Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Peneliti mengumpulkan data-data melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan pada staf humas setda kabupaten Karawang (komisioner) yang menjadi subjek penelitian berdasarkan teknik sampel yang telah ditentukan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada objek pembanding yakni masyarakat kabupaten Karawang berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti yakni wartawan, staf dinas, mahasiswa, dan petani.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan di tempat dan waktu yang berbeda, wawancara dilakukan selama 4 (empat) hari terhitung dari tanggal 6 Juni – 10 Juni 2011. Untuk mengatahui lebih jelas mengenai rincian dan waktu wawancara dapat dilihat dari tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Rincian Wawancara Peneliti

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Narasumber (Informan)	Narasumber (*Key Informan*)	Pekerjaan
1.	Selasa, 7 Juni 2011	10.00	Ruang Staf Humas Setda Kabupaten Karawang	Ade Kurnia, S. Kom	-	PNS
2.	Selasa, 7 Juni 2011	11.30	Ruang Staf Humas Setda Kabupaten Karawang	Mohamad Jaelani, S. Ag	-	PNS
3.	Selasa, 7 Juni 2011	14.40	Ruang Sekretaris Desa Sukaluyu	-	Heddy Yusuf	Jurnalistik
4.	Selasa, 7 Juni 2011	13.00	Ruang Sekretaris Desa Sukaluyu	-	Iskandar Guna	PNS
5	Rabu, 8 Juni 2011	13.00	Lahan Pertanian Peruri Karawang	-	Rommy Andhika Laksono	Mahasiswa
6.	Rabu, 8 Juni 2011	12.45	Lahan Pertanian Peruri Karawang	-	Arif Kurniawan	Penyuluh pertanian
7.	Kamis, 9 Juni 2011	10.00	Kantor Humas Setda Kabupaten Karawang	Lilis Ratna, S. Sos	-	PNS
8.	Jumat,10 Juni 2011	14.00	Kantor Humas Setda Kabupaten Karawang	Hendri M Yusup	-	PNS

Sumber : Data Peneliti, 2011

Peneliti juga melakukan studi pustaka sebagai alat ukur yang akan membantu mendeskripsikan hasil dan membatasi data penelitian sehingga lebih terarah pada hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini.

Agar lebih sistematis perlu disampaikan bahwa bab ini akan membahas tentang:

1. Deskripsi Identitas Informan (Responden) dan *Key Informan*
2. Deskripsi Hasil Penelitian
3. Pembahasan

4.1 Deskripsi Identitas Informan (Responden) dan *Key Informan*

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan yang telah ditentukan. Dilihat dari bagian-bagian staf Humas Setda Kabupaten Karawang yang bekerja dalam pengelolaan *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Peneliti juga melakukan wawancara kepada objek pembanding yakni masyarakat kabupaten Karawang berdasarkan kriteria yang memiliki keterkaitan / hubungan dengan *Cyber PR* Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Untuk lebih jelas peneliti akan menguraikan data mengenai informan (responden) dan *key informan*, berikut ini rinciannya :

A. Identitas Informan

1. **Ade Kurnia, S. Kom**

Gambar 4.1

Foto Ade Kurnia, S. Kom



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Bapak Ade Kurnia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bagian Humas Setda Kabuapten Karawang. Beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi di Humas

Setda Kabupaten Karawang, yang beralamatkan di jalan Jendral A.Yani No.1 Karawang.

Pria yang berusia 43 tahun ini biasa dipanggil dengan nama panggilan Ade, beliau menyandang pendidikan terakhir sebagai sarjana komputer. Saat ini beliau bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT.15/05 Kec. Kedung Waringin Bekasi.

2. Mohamad Jaelani, S. Ag

Gambar 4.2

Foto Mohamad Jaelani, S. Ag



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Pria yang memiliki nama panggilan N'zel adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Humas Setda Kabupaten Karawang, beliau menjabat sebagai pelaksana / staf humas bagian pemberitaan. Meskipun dalam kesehariannya beliau seringkali mendapat tugas ke luar kantor, namun pada dasarnya dalam bekerja beliau memiliki ketetapan untuk melakukan tugasnya di kantor humas yang beralamatkan di jalan Jendral A.Yani No.1 Karawang.

Adapun pria berusia 37 tahun yang bertempat tinggal di Kedungwaringin Karawang ini dikenal sebagai sosok yang agamis, beliau menyandang gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Bandung (UIN Bandung).

3. Lilis Ratna, S. Sos

Gambar 4.3

Foto Lilis Ratna, S. Sos



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Wanita yang memiliki nama panggilan Cantiq ini berusia 29 tahun. Pendidikan terakhir yang beliau sandang adalah sarjana ilmu komunikasi di Universitas Mustopo Jakarta. Tempat tinggal beliau yaitu di jalan Raya Pabayuran No.50 Bekasi. Wanita ini dikenal sebagai sosok yang humoris dan ramah, serta memiliki hobi menyanyi.

Saat ini beliau bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Humas Setda Kabupaten Karawang, yang beralamatkan di jalan jendral A.Yani No.1 Karawang. Beliau menjabat sebagai staf Humas Bagian Data dan Sistem Informasi.

4. Hendri M Yusup

Beliau adalah seorang pria yang berusia 29 tahun, bertemapat tinggal di jalan Pangkal Perjuangan Kp.Karang Anyar RT.06 / RW.09 Tanjung Mekar Karawang. Beliau menyandang pendidikan terakhir yaitu D3 (Diploma 3).

Saat ini pria yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Hendri bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Humas Setda Kabupaten Karawang dan menjabat sebagai staf humas bagian dokumentasi, adapun alamat kantornya terletak di jalan Jendral A.Yani No.1 Karawang.

B. Identitas *Key Informan*

1. Heddy Yusuf

Beliau adalah seorang jurnalis / wartawan dari lulusan D3 jurnalis. Pria yang berusia 46 tahun ini memiliki jabatan sebagai pemimpin redaksi / penanggung jawab media *online* "The Karawang Post.com".

Melihat perjalan beliau di bidang jurnalistik tidak dapat diragukan lagi, karena pada dasarnya berbagai pengalaman telah beliau dapatkan. Adapun beliau telah tergabung dalam PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Karawang, tepatnya di jalan Malabar F. 12 Karang Pawitan, Karawang Barat. Adapun beliau bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim (Kaum 3) No. 17 Karawang 41311.

2. Iskandar Guna

Gambar 4.4

Foto Iskandar Guna



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Bapak Iskandar Guna adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Beliau menjabat sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Sukaluyu, tepatnya di jalan Raya Kalipandan Teluk Jambe Timur Karawang. Pendidikan terkhir yang beliau sandang adalah Diploma 3 (D3).

Pria berusia 45 tahun ini dikenal sebagai sosok yang humoris dan baik, beliau juga merupakan seseorang yang rajin dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Saat ini beliau tinggal di jalan HDS. Cokroaminoto No. 27 Karawang.

3. Rommy Andhika Laksono

Pria ini adalah seorang alumni / lulusan SMA Negeri 1 Teluk Jambe Karawang, yang saat ini merupakan Mahasiswa Unsika (Universitas Singga Perbangsa Karawang Jurusan Teknologi Pertanian). Adapun di usianya yang ke-23 tahun, beliau tengah menyusun TA (Tugas Akhir).

Beliau memiliki hobi olah raga basket, beliau juga dikenal aktif, baik dalam berorganisasi ataupun kegiatan lainnya. Beliau saat ini tinggal di Desa Teluk Jambe RT.11/RW.04 No.82 Teluk Jambe Karawang.

4. Arief Kurnia

Gambar 4.5

Foto Arief Kurnia



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2011

Pria yang berusia 22 tahun ini adalah seoarang petani yang bekerja di jalan Raya Tambak Sari Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang. Adapun beliau bertempat tinggal di jalan Sumur Jaya RT.04/RW.04 Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang. Pendidikan terakhir yang beliau sandang adalah SLTA.

Saat ini beliau menjabat sebagai penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Hal tersebut sesuai dengan minat dan kemampuannya di bidang pertanian. Sehingga dengan bermodal pengetahuan beliau mampu mendapatkan kedudukan sebagai penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada Sub bab ini peneliti akan menguraikan data-data berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Informasi-informasi tersebut berasal dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden dan data yang diberikan langsung dari mereka. Pertanyaannya mengenai **eksistensi** dengan indikator berdasarkan lima dimensi dalam *balanced e-Government scorecard* yang masing-masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detil. Dimana kelima dimensi tersebut peneliti jadikan sebagai sub fokus dari eksistensi, yang dikemukakan oleh Stiftung, 2001 (dalam Indrajit, Indrajit, 2005 : 43) yaitu : **manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi,** dan **manajemen perubahan**.

4.2.1 Manfaat dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994 : 858), kata manfaat diartikan sebagai “guna, faedah, laba, untung”. Sehingga manfaat berdasarkan pengertiannya masing-masing adalah “guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkan.[1]

Berdasarkan definisi manfaat dapat diketahui bahwa manfaat berhubungan dengan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan dan bagaimana masyarakat

[1] http:// DEFINISI/def.manfaat.htm (13/03/2011, 21:46)

dapat memperoleh / merasakan layanan tersebut, hal itu dapat ditentukan dari : **Keuntungan,** dan **Hasil Karja.**

Dalam menentukan kriteria **manfaat** khususnya pada layanan informasi masyarakat melalui *cyber PR* sebagai *e-government*, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pengelolaannya memberikan tugasnya kepada bagian hubungan masyarakat (humas) yang terdiri dari **bagian data dan sistem informasi**, **pemberitaan**, dan **dokumentasi**. Mengingat bahwa bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dalam pengelolaan data dan sistem informasi, dokumentasi serta pengelolaan pemberitaan. Maka fungsi humas sendiri adalah :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi.
c. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan dokumentasi.

Adanya *cyber PR* dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat ataupun staf Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu manfaatnya yaitu dapat memperoleh keuntungan serta mengetahui hasil kerja melalui *cyber PR* tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh jawaban dari informan, yang pertama yaitu Ade Kurnia, S. Kom (Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi), beliau berpendapat bahwa**:**

Manfaat dari *cyber PR* bagi Pemerintah Kabupaten Karawang adalah dapat memberikan **keuntungan** dalam menyampaikan hasil-hasil pembangunan, informasi

/ pengumuman yang bersifat urgen, sosialisasi, produk-produk hukum, dan perizinan. Artinya dengan adanya *cyber PR* di Pemerintah Kabupaten Karawang, dapat memberikan kemudahan bagi humas setda kabupaten Karawang dalam menyampaikan informasi, baik kepada masyarakat ataupun kepada pihak lain / dinas yang bersangkutan. Sehingga dengan *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang), masyarakat juga dapat memperoleh informasi tersebut secara mudah.

Selain itu, dengan adanya *cyber PR* Pemda Karawang juga dapat mengetahui bagaimana **hasil kerja** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang dari *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang), terutama pada Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi yaitu merekap (mengetik ulang), *entre* data, pengeditan, *entre* data lagi, *preview*, dan *report* (dapat berupa tampilan dalam *website* karawang / print). Data yang didapatkan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni berupa data-data hasil pembangunan, produk hukum, sosialisasi, dan informasi pengadaan barang dan jasa. Adapun data tersebut harus melalui proses *Update* data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Membuat surat *update* data dan surat permohonan
- Surat *update* dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Tunggu balasan pengiriman dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Setelah diterima kembali di kantor Humas Setda Kabupaten Karawang, maka data *update* juga diproses kembali oleh staf Humas bagian data dan sistem informasi, dengan cara : Direkap (diketik ulang), *entre* data, pengeditan, *entre* data lagi, *preview*, dan yang terakhir *report* (dapat

berupa tampilan dalam *website* Karawang / print).

Berikut ini adalah salah satu data OPD yang tersedia pada layanan *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya masyarakat ingin melakukan pencarian data tentang pertanian, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Ketik alamat www.karawangkab.go.id pada *browser*, tampilan muka *website* seperti terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.6

Tampilan Muka *Website* Karawang

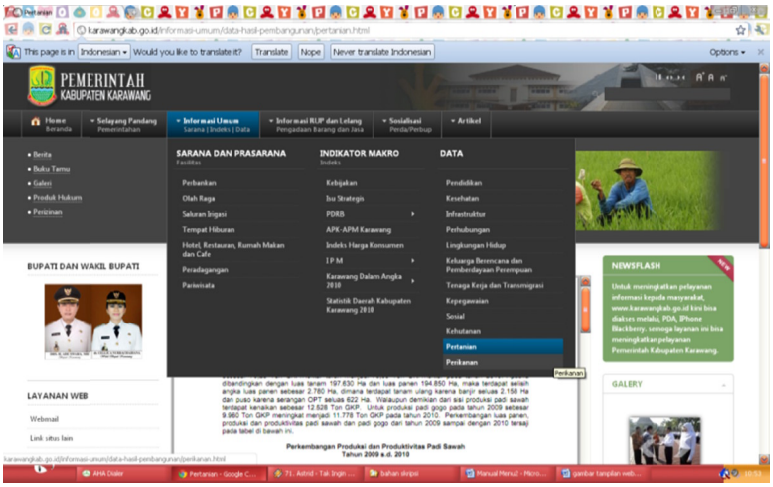


Sumber : Data Peneliti, 2011 (*Website* : www.karawangkab.go.id)

2. Klik informasi umum, pilih dan klik pertanian. Tampilan seperti terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.7

Tampilan Informasi Umum pada *Website* Karawang

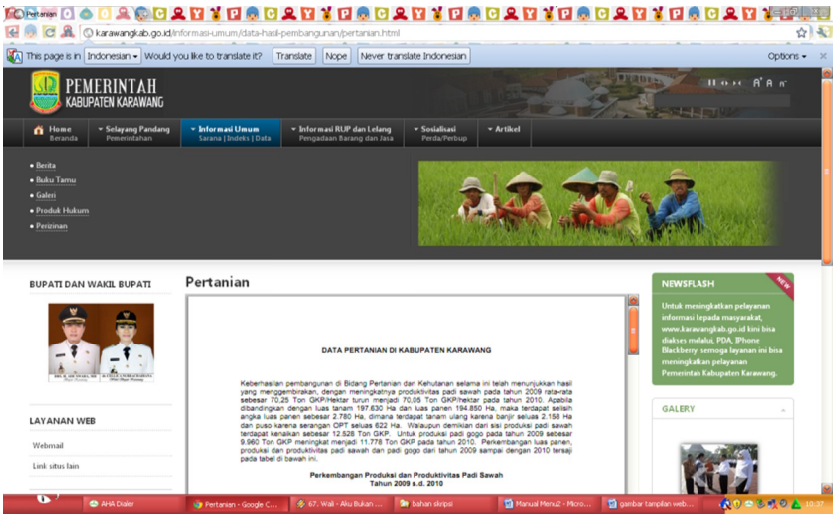


Sumber : Data Peneliti, 2011 (*Website* : www.karawangkab.go.id)

3. Kemudian akan muncul data-data tentang pertanian, seperti yang ada pada tampilan berikut ini :

Gambar 4.8

Tampilan Data Pertanian pada *Website* Karawang



Sumber : Data Peneliti, 2011 (*Website* : www.karawangkab.go.id)

Sementara Mohamad Jaelani, S. Ag (Pelaksana / Staf Humas Bagian Pemberitaan), menambahkan bahwa manfaat dari *cyber PR* yaitu dapat memberikan **keuntungan** bagi Pemerintah Kabupaten Karawang yakni sebagai media informasi bagi para PNS dan masyarakat kelas menengah yang mampu menggunakan internet. Artinya bagi para PNS khususnya staf humas setda kabupaten Karawang dapat memanfaatkan *cyber PR* sebagai sumber informasi, baik yang berkaitan dengan tugas pokok, informasi umum, ataupun informasi lainnya. Selain itu *cyber PR* tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu menggunakan internet, sehingga masyarakat sendiri dapat memperoleh bahkan memberikan informasi dengan cepat, dapat dilakukan kapan dan dimana saja, serta dari informasi yang diperoleh dapat menjadi inspirasi bagi peluang usaha ekonomi rakyat, sehingga dari keuntungan tersebut masyarakat dapat merasakan keterbukaan, serta berbagai jenis informasi dan masalah.

Adapun **Hasil kerja** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang dari *cyber PR* pada bagian pemberitaan yaitu pembuatan *website* resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, interaksi langsung dengan masyarakat, membuat laporan penyelenggaraan pemerintah, menyediakan layanan *SMS Gateway*, serta membuat majalah Pemkab Karawang secara cetak dan *online*.

Untuk lebih memastikan jawaban mengenai manfaat *cyber PR*, peneliti juga melakukan wawancara dengan *key informan*. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang mengakui dengan adanya *cyber PR* dapat diperoleh keuntungan serta guna dari informasi yang tersedia pada layanan

cyber PR tersebut. Seperti halnya Heddy Yusuf (Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab Media *Online* "The Karawang Post.com") memberikan jawaban tentang **keuntungan** yang dapat diperoleh setelah mengunjungi *cyber PR* (*website* Karawang) yaitu beliau mengatakan saat ini dalam mengakses informasi dapat dilakukan secara lebih mudah, karena menurut pendapatnya pemerintah kabupaten Karawang sudah lebih bagus dan lebih maju dalam memberikan informasi, baik tentang pembangunan, statistik, dan lain-lain. Sementara guna dari informasi yang diperoleh dari *website* Karawang adalah sebagai sumber informasi, karena *website* Karawang menyediakan berbagai macam informasi terutama tentang berita-berita kabupaten Karawang yang dapat diperoleh secara cepat, kapan, dan dimana saja.

Selain itu, **Rommy Andhika Laksono (Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang Jurusan Teknologi Pertanian)** juga mengemukakan bahwa **keuntungan** setelah mengunjungi *cyber PR* (*website* Karawang) adalah dapat memperoleh berbagai keunggulan kabupaten Karawang dan banyak layanan yang dapat diakses seperti halnya kita dapat memperoleh dan mencari informasi tentang potensi kabupaten Karawang, baik tentang topografi, rencana kegiatan, dan prestasi yang telah dicapai kabupaten Karawang, serta dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritikan yang membangun melalui layanan *website* Karawang (www.karawangkab.go.id). Sehingga dari keuntungan tersebut, dapat dikatakan bahwa guna dari informasi yang diperoleh melalui *website* Karawang yakni dapat memperoleh berbagai informasi tentang potensi-potensi, dan SDM di kabupaten Karawang.

4.2.2 Efisiensi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut Mulyamah (1987 : 3), efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.[2]

Berdasarkan definisi efisiensi dapat diketahui bahwa efisiensi berhubungan dengan bagaimana teknologi bisa mempercepat proses dan meningkatkan kualitas layanan, efisiensi tersebut dapat terwujud jika disertai dengan : **Kemudahan, rencana,** dan **realisasi.**

Agar terwujudnya efisiensi, humas setda kabupaten Karawang melakukan *update* data dengan cara mengubah data pada manual menu admin *website* portal pemerintah kabupaten Karawang. *Website* Portal Pemerintah Kabupaten Karawang bersifat interaktif berbasis CMS *(Contents Management System)*, yaitu *Website* yang dengan mudah dapat dirubah / ditambah / dihapus dan isi data tekstual / gambar oleh para penggunanya (staf humas Setda kabupaten Karawang) secara mudah dan cepat. Sehingga dari *Website* Portal itulah humas setda kabupaten Karawang dapat

[2] http://DEFINISI/def.efisien.htm (13/03/2011, 21:46)

memperoleh kemudahan dalam meng-*update* data atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Adapun program web yang digunakan yaitu :

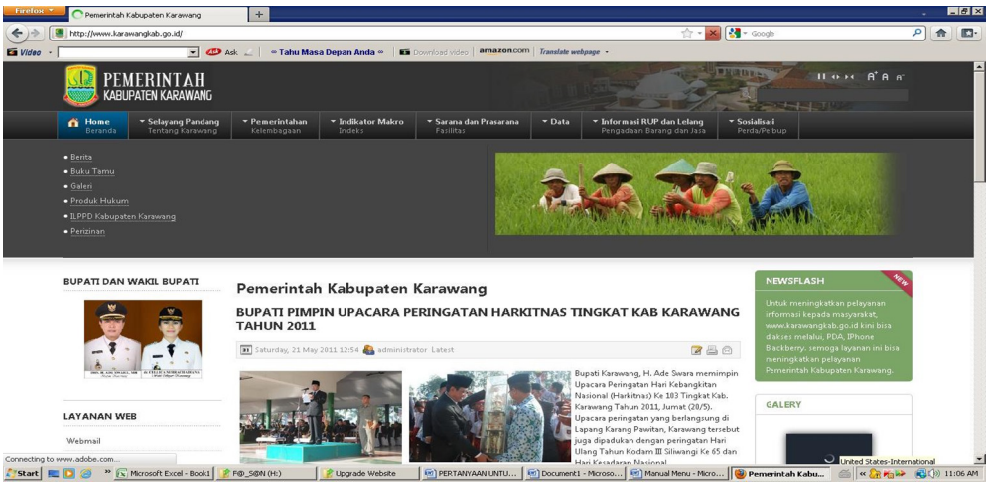
- *Developer* : PHP/Java
- *Database Engine* : MySql

Berikut ini cara untuk menjalankan menu admin :

1. Untuk menggunakan *Website*, ketik alamat www.karawangkab.go.id pada *browser*, tampilan muka *website* seperti terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.9

Tampilan Muka *Website* Karawang

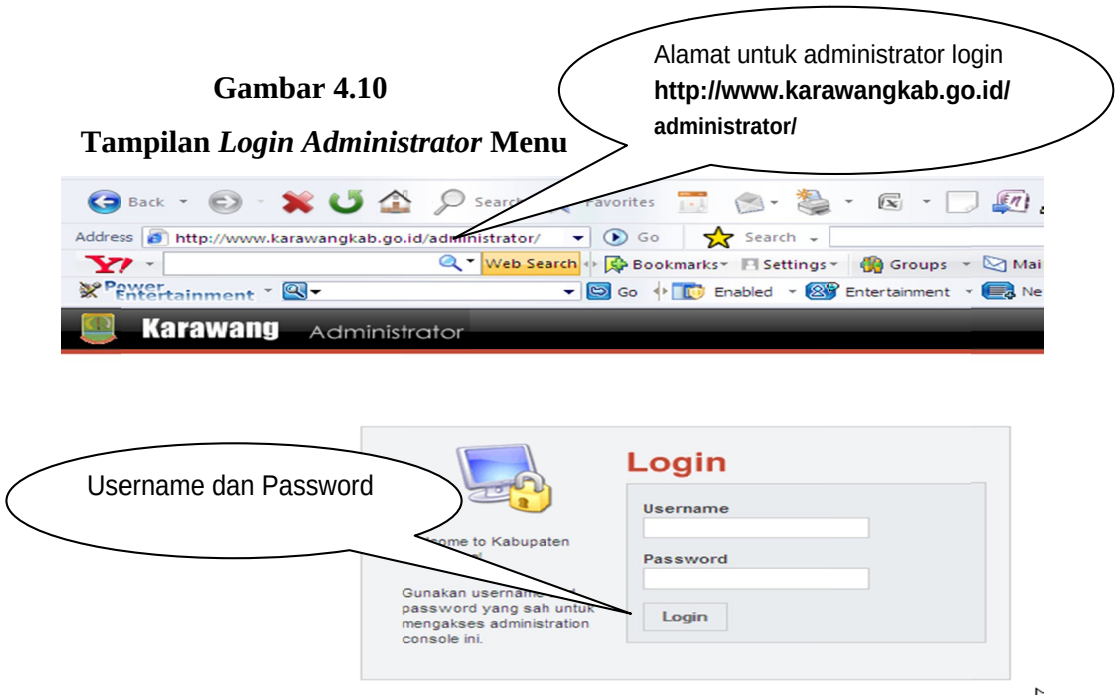


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

2. Untuk masuk kedalam Menu Admin, ketik alamat www.karawangkab.go.id/administrator pada *browser*, kemudian akan muncul tampilan seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 4.10

Tampilan *Login Administrator* Menu

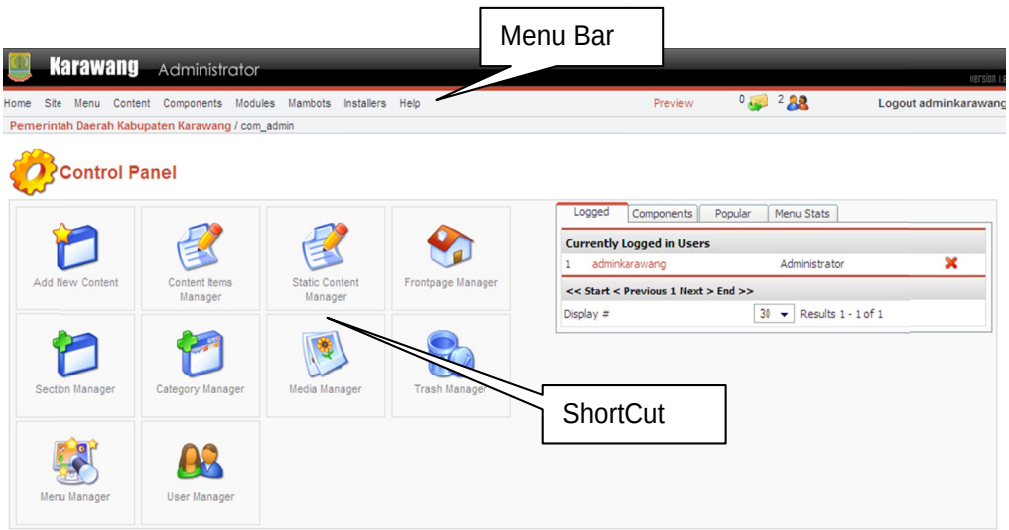


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

3. Setelah mengisi *Login Username* dan *Password*, klik button *login*, kemudian tampilan akan terlihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.11

Tampilan *Screen Administrator*



Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Pengisian *Content* bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan menubar dan *shortcut*.

Tabel 4.2

Content yang disediakan dalam *Website* Kabupaten Karawang

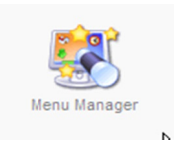
No	Jenis	Keterangan
1.	Menu	Untuk mengelompokan Tampilan dalam *website*
2.	Content : a. *Static Content* b. *Content Dinamis*	- Untuk content yang bersifat relatif statis - Untuk content yang bersifat dinamis atau sering berubah seperti berita dan *news ticker*
3.	*Gallery*	Menampilkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk gambar
4.	*Guest Book*	Untuk mengatur buku tamu yang diisi oleh pelanggan
5.	*Poll*	Jejak Pendapat
6.	Produk Hukum	Mengatur, mempublikasikan produk hukum
7.	*Forum*	Untuk mengatur diskusi atau forum
8.	*Banner*	Gambar bergerak yang menyampaikan berbagai macam informasi
9.	*Even Calendar*	Menampilkan kegiatan dalam bentuk kalender
10.	Info *Kurs*	Informasi Kurs Mata Uang Rupiah dan Mata Uang Asing

Pengenalan Menu

Menu adalah sebuah fasilitas untuk membuat kelompok-kelompok informasi yang akan disampaikan dalam *website*.

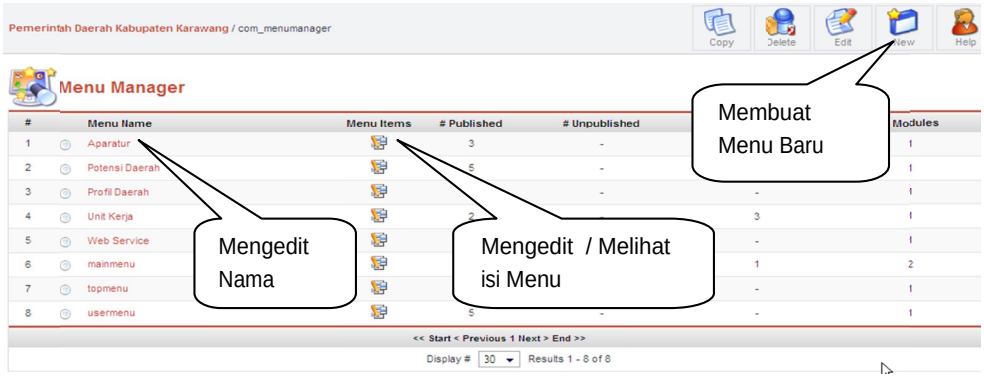
a. Melihat dan Membuat Menu Baru :

Klik ShortCut



Gambar 4.12

Tampilan Manu *Manager*

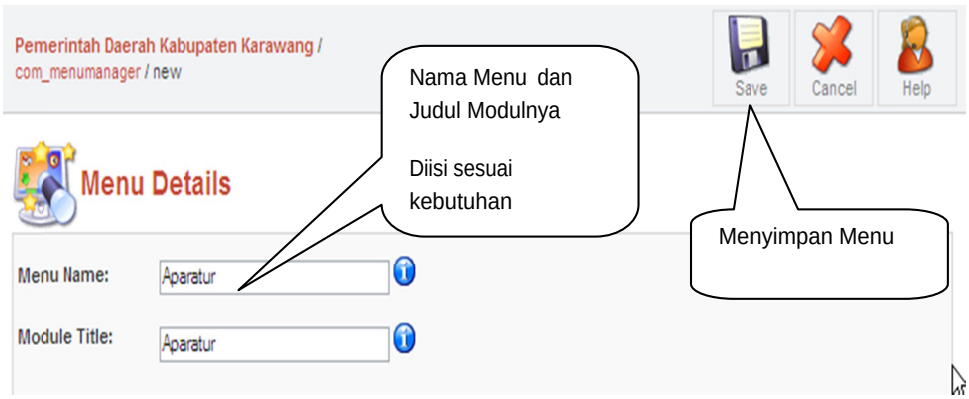


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Gambar diatas adalah menu yang telah dibuat, untuk selanjutnya bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini cara untuk membuat menu baru, dapat dilihat pada tampilan berikut ini :

Gambar 4.13

Tampilan Manu *Details*

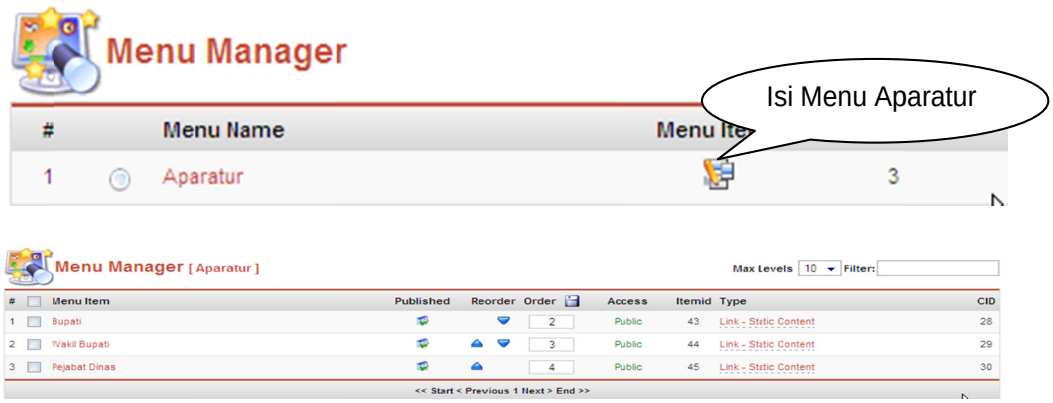


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Berikut ini cara untuk membuat dan edit menu, seperti tampilan pada gambar 4.14 :

Gambar 4.14

Tampilan Manu *Manager* (membuat dan meng-edit)



Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

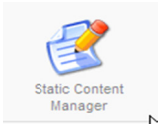
Menu item adalah isi dari menu Aparatur untuk mengedit *klik* nama menu itemnya. *Type Link-Static Content* adalah *type* menu yang dihubungkan ke salah satu *static content*.

Pengenalan Content

1. ***Content Static,*** adalah *content* yang bersifat statis. Segala perubahan pada c*ontent* ini dilakukan dengan memperhatikan letak dan sifat dari *content*-nya. *Content* dialokasikan pada informasi-informasi yang jarang berubah seperti : menu-menu, profil, selayang pandang, dll. Content ini bisa dikaitkan dengan salah satu menu sesuai dengan kebutuhan.

   Contoh Menu **Selayang Pandang** dikaitkan dengan *Static Content* **Selayang Pandang**. Berikut ini cara mengisi dan meng-edit *static content* :

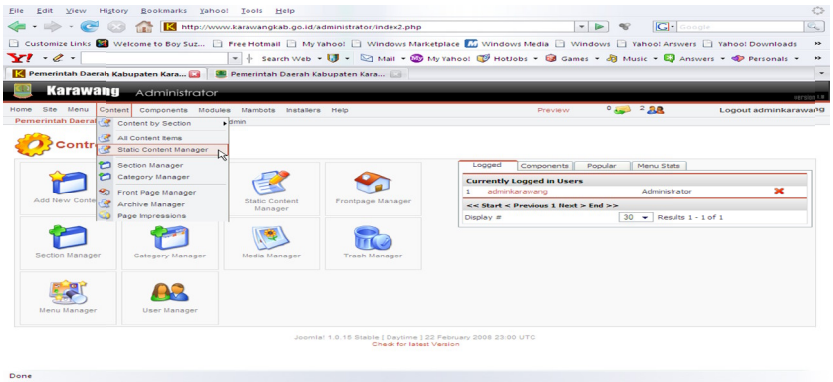
Klik ShortCut



Atau Menubar ***Content, Static Content Manager***, dapat dilihat pada tampilan berikut ini :

Gambar 4.15

Tampilan Manu *Content*

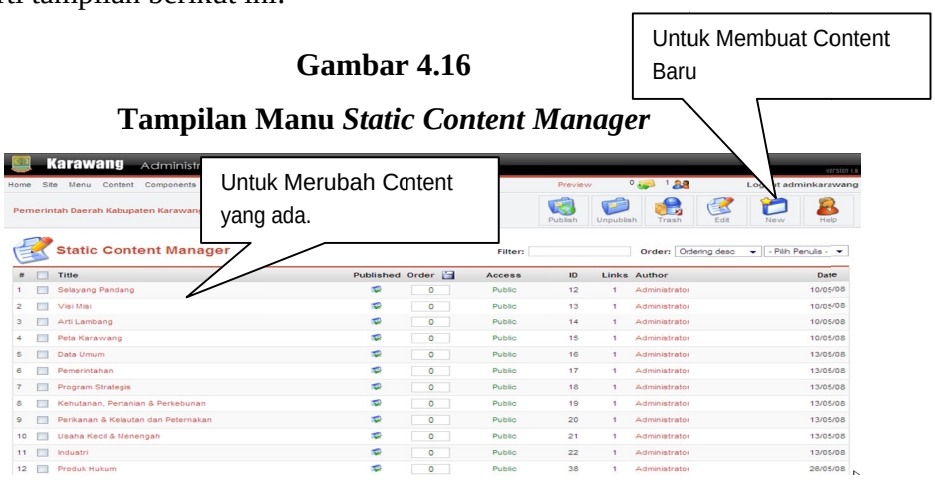


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Proses diatas akan menampilkan seluruh informasi tentang *static content* seperti tampilan berikut ini:

Gambar 4.16

Tampilan Manu *Static Content Manager*

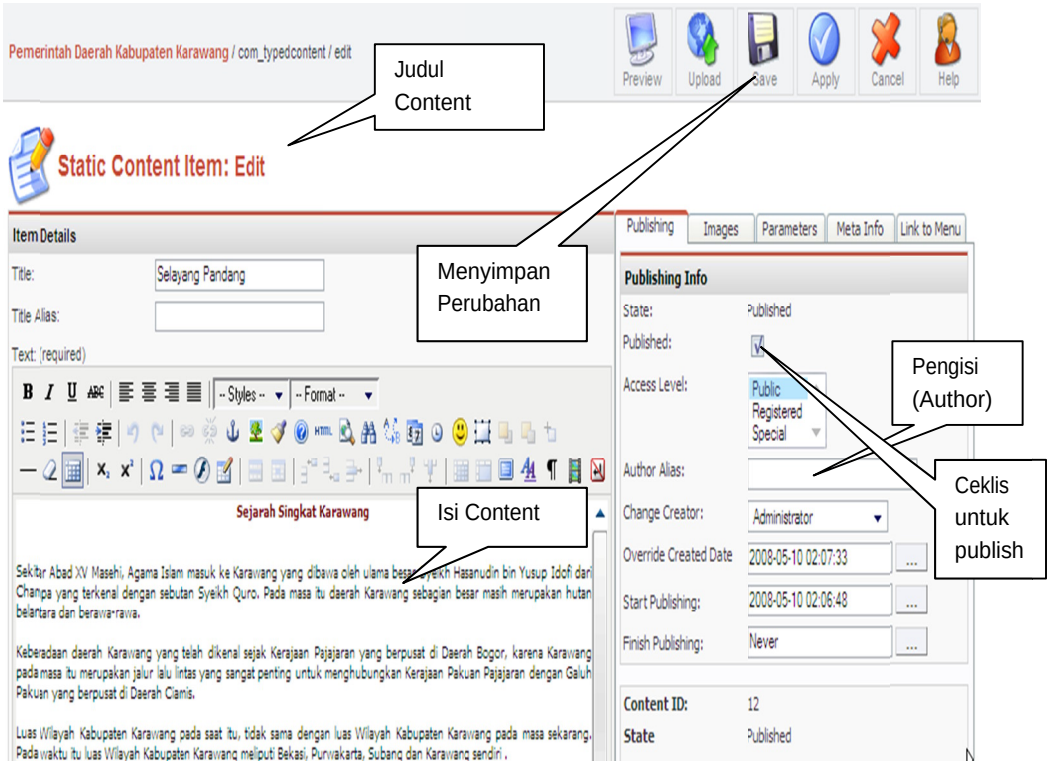


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Kemudian *klik title content* yang akan di **edit** misal Selayang Pandang, dapat dilihat pada tampilan di bawah ini :

Gambar 4.17

Tampilan Manu *Static Content Item* (Edit)

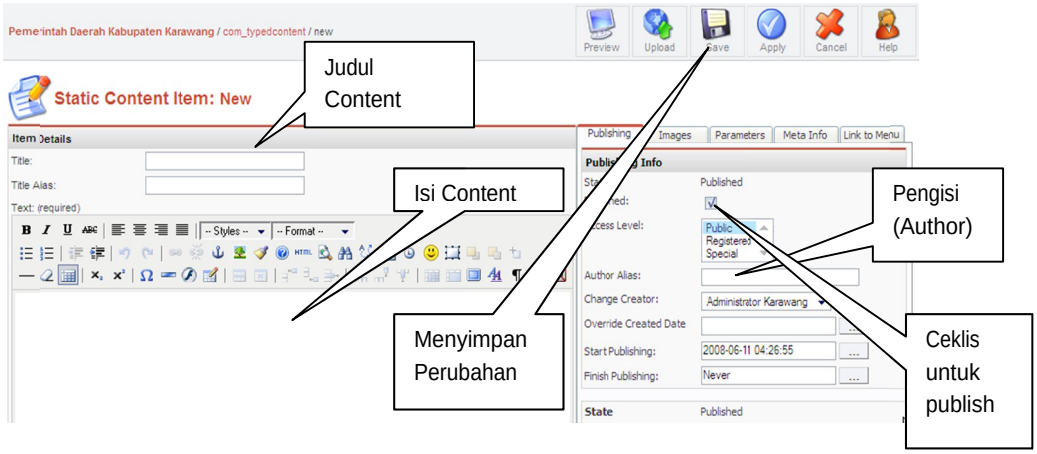


Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

Content ini juga bisa di buat baru sesuai dengan kebutuhan atau informasi statis yang ingin ditayangkan didalam *website*, berikut ini tampilannya :

Gambar 4.18

Tampilan Manu *Static Content Item* (*New*)



Sumber : Arsip Humas Setda Kabupaten Karawang, 2011

2. *Content Dinamis*

Content dinamis adalah *content* yang disediakan untuk informasi-informasi yang selalu berubah. *Content* dinamis yang disediakan dalam *website* Kabupaten Karawang adalah :

a. *News*, merupakan informasi dalam bentuk berita.

b. *News Ticker*, merupakan informasi dalam teks berjalan.

Keberadaan *cyber PR* pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam memberikan pelayanan terutama pada layanan informasi masyarakat, artinya dengan *cyber PR* tersebut informasi dapat disampaikan langsung kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana efisiensi dari *cyber PR* di humas Setda Kabupaten Karawang, peneliti melakukan wawancara dengan informan.

Berikut ini pendapat yang dikemukakan Mohamad Jaelani, S. Ag (Pelaksana / Staf Humas Bagian Pemberitaan), menurut beliau efisiensi *cyber PR* dapat dilihat dari **kemudahan** yang diperoleh staf humas setda kabupaten Karawang terutama pada bagian pemberitaan yaitu dalam memperoleh informasi dapat diakses secara langsung. Selain itu, dengan adanya *cyber PR* sebagai *e-government* dapat memberikan pelayanan informasi kepada media massa, seperti halnya bagian pemberitaan dapat memberikan data *release* / *press release* kepada wartawan secara langsung, baik melalui *website* Karawang atau *e-mail*.

Berdasarkan pendapat di atas, beliau pun memberikan penjelasan bahwa perencanaan pada keseluruhan aspek pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia sudah maksimal, namun harus diperbaiki lagi, baik pada model ataupun anggaran. Sehingga **rencana** yang akan dilakukan selanjutnya adalah menyiapkan para staf / SDM yang memadai, serta menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Dalam **merealisasikan** *cyber PR* kepada masyarakat, humas setda kabuapten Karawang khususnya bagian pemberitaan melakukan sosialisasi, *road show*, *talk show*, penerbitan majalah, serta penyiapan program dan anggaran.

Adapun **Iskandar Guna (Sekretaris Daerah)**, yang peneliti wawancarai sebagai *key informan* pada pendapatnya mengakui bahwa humas setda kabupaten Karawang dalam **merealisasikan** *cyber PR* (*website* Karawang) kepada masyarakat dianggap sudah cukup baik, karena humas dapat memberikan informasi dengan mudah dan cepat kepada staf / perangkat daerah kabupaten Karawang. Selain itu,

realisasi tersebut sudah disosialisasikan melalaui radio, majalah Karawang, koran, bahkan kalender.

Bagi beliau **kemudahan** yang dapat diperoleh dari adanya *cyber PR* (*website* Karawang) yakni dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Sehingga **rencana** yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui *website* Karawang, beliau ingin menyediakan komputer yang disertai instalasi internet agar dapat digunakan untuk mencari dan memperoleh informasi melalui *website* Karawang kapan saja.

4.2.3 Partisipasi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al*. (1999 : 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[3]

Berdasarkan definisi partisipasi dapat diketahui bahwa partisipasi berhubungan dengan pertanyaan apakah layanan yang tersedia dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi dalam penyampaian pendapat dan proses pengambilan keputusan, hal itu dapat ditentukan dari kriteria berikut ini : **Keikutsertaan, potensi, solusi,** dan **keterlibatan.**

Mengingat bahwa pentingnya partisipasi masyarakat pada *cyber PR*, maka humas setda kabupaten Karawang harus menyediakan pelayanan terutama layanan informasi dengan sebaik-baiknya dan selengkap mungkin. Layanan informasi yang tersedia harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat sendiri dapat memnuhi kebutuhan akan informasi yang ingin diperoleh, baik mengenai berita ataupun pencarian data.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dari *cyber PR* sebagai *E-Government* (*website* Karawang) , peneliti melakukan wawancara dengan informan, adapun jawaban yang diuraikan oleh Ade Kurnia, S. Kom (Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi), yakni **keikutsertaan** masyarakat dalam kegiatan untuk memperoleh informasi melalui *website* sangat baik, karena masyarakat berperan sebagai pemberian saran dan masukan untuk perbaikan *website*. Artinya dengan adanya *website* (*cyber PR* sebagai *e-government*) masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhan khususnya tentang *website* Karawang. Dari keluhan tersebut **potensi**

[3] http://DEFINISI/def.partisipasi.htm (13/03/2011, 21:50)

yang dapat diperoleh humas adalah dapat mengetahui permasalahan / keluhan, saran / masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui buku tamu.

Berbicara tentang keluhan masyarakat seringkali berkaitan dengan pendapat negatif, untuk itu diperlukan **solusi** dari humas dalam mengatasi pendapat negatif tersebut, salah satunya yaitu dengan memperbaiki kekurangan sesuai kemampuan dan tidak menyimpang dari tupoksi. Hal itu tentu saja harus dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang agar masyarakat dapat memperoleh kepuasan dari apa yang mereka sampaikan melalui *website*.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki **keterlibatan** dalam proses evaluasi perubahan dari *website* Karawang yaitu melalui kritik, saran dan masukan. Hal itu merupakan cara untuk membangun kinerja pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan secara lebih baik lagi.

Mohamad Jaelani, S. Ag (Pelaksana / Staf Humas Bagian Pemberitaan), juga menambahkan bahwa **keikutsertaan** masyarakat dalam kegiatan untuk memperoleh informasi melalui *website* cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah pengunjung *website*, dimana jumlah pengunjung yang *log in* sekitar 2000 orang per harinya, maka dari jumlah pengunjung dapat diketahui berapa banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam *website* karawang.

Selain itu, ada **potensi** yang dapat diperoleh dari masyarakat dalam *website* karawang yaitu dapat mengetahui banyaknya alumni IT (Informasi teknologi), artinya pemerintah daerah kabupaten Karawang dapat mengetahui berapa banyak masyarakat

yang memiliki keahlian dibidang IT / masyarakat yang mampu menggunakan media *online* (internet), sehingga pemda Karawang merasa tertuntut untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi *online* dengan sebaik-baiknya.

Menurut pendapat beliau, jika ada pendapat negatif dari masyarakat mengenai *website* Karawang, maka sebagai **solusi** staf humas setda kabupaten Karawang akan melakukan klarifikasi, konfirmasi, konsolodasi dan dialog. Adapun pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya yaitu melakukan konfirmasi dengan cara menginformasikan secara benar dan terpercaya, serta memberikan jawaban yang pasti dari permasalahan yang terjadi. Selama ini belum ada **keterlibatan** langsung dari masyarakat dalam proses evaluasi perubahan dari *website* Karawang, tetapi banyak pesan SMS yang masuk melalui SMS *Gateway*.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang partisipasi masyarakat dari *cyber PR*, peneliti melakukan wawancara dengan *key informan*, yang pertama yaitu Heddy Yusuf (Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab Media Online "The Karawang Post.com"), beliau menjelaskan bahwa **keikutsertaannya** dalam kegiatan untuk memperoleh informasi melalui *website* Karawang cukup memiliki peran, karena tujuan / kepentingannya sebagai wartawan yang bertugas untuk mencari informasi dan mengumpulkan data.

Potensi yang dapat diperoleh beliau setelah mengunjungi *website* Karawang yakni dapat mengetahui berbagai informasi tentang kabupaten Karawang dan dapat memperoleh data-data yang diperlukan (untuk diberitakan kembali kepada masyarakat). Adapun pada **keterlibatan** dalam mengikuti setiap perubahan *update*

informasi *website* Karawang, beliau cukup mengikuti perkembangan dari informasi yang ada pada *website* tersebut.

Namun perlu diketahui meskipun dilihat dari isi *website*-nya sudah cukup lengkap, semua itu masih perlu diperbaiki lagi, karena setelah mengunjungi *website* Karawang, seringkali ditemukan masalah, seperti halnya berita baru tidak langsung di *update*, dalam arti humas lambat meng-*update* berita baru tersebut, sehingga pada penyampaian informasi kalah cepat dengan media *online* lain seperti "BadaidotCom". Untuk permasalahan ini beliau memilih untuk menyampaikan langsung kepada humas agar ada solusi dari humas sendiri. **Solusi** dari humas tentang permasalahan tersebut adalah humas setda kabupaten karawang akan memperbaiki dengan cara selalu meng-*update* berita-berita baru.

Berbeda dengan pendapat Rommy Andhika Laksono (Mahasiswa Unsika Jurusan Teknologi Pertanian), setelah mengunjungi *website* Karawang, beliau pun seringkali menemukan masalah, beliau menganggap bahwa masih bayak informasi yang di butuhkan masyarakat kurang *up to date* terutama di sektor pertanian. Namun permasalahan tersebut tidak beliau sampaikan secara langsung kepada humas, karena menurut pandangannya kurang adanya wadah untuk menyampaikannya keluhan dan saran pada *website* tersebut, sehingga tidak ada **solusi** / *feedback* dari humas tentang permasalahan tersebut.

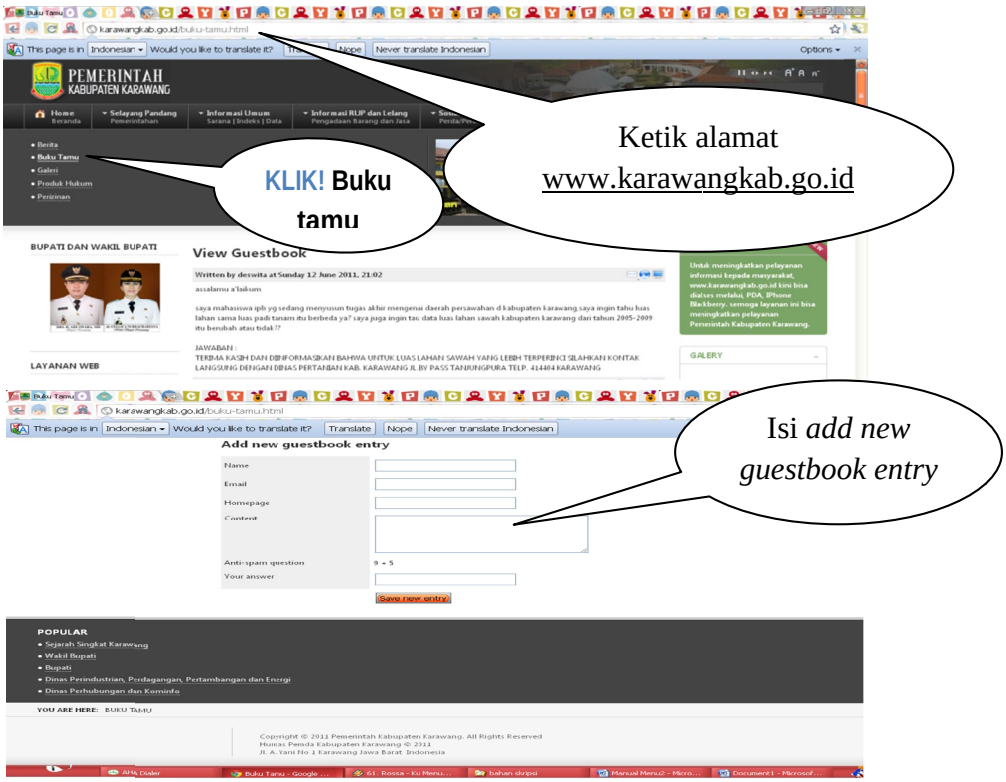
Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa setiap permasalahan tentang *cyber PR* ada yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada humas Setda kabupaten Karawang tetapi ada juga yang tidak. Namun pada dasarnya perlu

diketahui oleh masyarakat bahwa humas Setda kabupaten Karawang telah menyediakan wadah untuk menampung segala permasalahan atau keluhan dari masyarakat yaitu dengan cara mengirim *SMS Gateway* ke No. 085890624444, atau menyampaikan langsung permasalahan / keluhan tersebut melalui buku tamu yang tersedia pada layanan *website* Karawang, caranya yaitu :

1. Ketik alamat www.karawangkab.go.id pada *browser*, klik buku tamu, maka akan muncul *view guestbook*, kemudian isi *add new guestbook entry*, klik *save new entry*. Tampilan seperti terlihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.19

Tampilan Buku Tamu / *View Guestbook* pada *Website* Karawang



Sumber : Data Peneliti, 2011 (*Website* : www.karawangkab.go.id)

4.2.4 Transparansi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan *performance* serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat.[4]

Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi transparansi dapat diketahui bahwa transparansi ditujukan untuk mengetahui apakah pemerintah mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan. Kriteria transpransi antara lain : **Prinsip** dan **keterbukaan.**

Dalam menghadapi perubahan teknologi dan perkembangan internet saat ini, Humas Setda Kabupaten Karawang menggunakan media *online* sebagai media publikasi salah satunya yaitu dalam menyebar luaskan informasi kepada masyarakat.

---

[4] Adri Mustiko, Peran Prinsip Transparansi dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas Terbuka, dikutip dari buku *Corporate Governance* oleh Tager I. Nyoman (Tesis, 2005).

Hal itu dilkukan karena Pemerintah Kabupaten Karawang menyadari bahwa dewasa ini tidak ada ada satupun kebijakan pemerintah yang dapat luput dari sorotan dan kritikan masyarakat, karena akses publik terhadap semua jenis informasi sudah sangat terbuka dan beragam. Sehingga pemerintah dan para pengambil keputusan dalam organisasi apapun saat ini ditantang untuk dapat merumuskan tanda-tanda jaman seperti yang diisyaratkan oleh gelombang demokratisasi dan transparansi.

Untuk mengetahui bagaimana transparansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penyampaian informasi melalui *cyber PR* (*website* Karawang) dapat ditentukan dari prinsip pemda Karawang sendiri, dimana dari prinsip tersebut dapat menciptakan keterbukaan. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa **prinsip** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah memberikan layanan informasi yang *up to date* dan relevan, dimana dengan informasi atau berita yang *up to date* dan relevan, masyarakat dapat merasakan adanya transparansi pada layanan informasi yang diberikan.

Sementara **keterbukaan** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi mengenai *performance*-nya hanya sebatas hasil kerja pemerintah yang di informasikan melalui ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan infromasi tersebut ditampilkan pada *website* Karawang selama satu bulan. Hal ini merupakan jawaban dari Ade Kurnia, S. Kom (Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi) yang beliau kemukakan pada saat wawancara.

Pendapat Mohamad Jaelani, S. Ag (Pelaksana / Staf Humas Bagian Pemberitaan), sama halnya dengan pendapat di atas yang menyebutkan bahwa **prinsip** dari pemda Karawang dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah memberikan informasi yang *up to date*, jelas dan transparan. Namun beliau menambahkan **keterbukaan** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi mengenai *performance*-nya dapat dikatakan sudah transparan, karena pemda Karawang memberikan informasi dengan jelas mengenai layanan dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Adapun berbeda dengan pendapat di atas, berbicara tentang transparansi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penyampaian informasi melalui *cyber PR* (*website* Karawang), dari hasil wawancara dengan *key informan*, peneliti memperoleh jawaban atau pendapat yang bertolak belakang dengan jawaban-jawaban dari informan. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Heddy Yusuf (Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab Media Online "The Karawang Post.com"), yang menyatakan bahwa **prinsip** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi kepada masyarakat belum terbuka atau transparan, karena menurut pandangannya informasi yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas informasi / berita yang positif saja.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Rommy Andhika Laksono (Mahasiswa Unsika Jurusan Teknologi Pertanian), meskipun beliau menyatakan pendapat bahwa **prinsip** pemerintah daerah kabupaten Karawang sudah terbuka tetapi tidak semua bagian dapat diperoleh, karena di satu sisi beliau masih menganggap belum

lengkapnya pendataan seperti informasi antar kecamatan dan daerah-daerah pelosok kabupaten Karawang di semua sektor. Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya **prinsip** pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi kepada masyarakat belum terbuka atau transparan.

4.2.5 Manajemen Perubahan dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Manajemen perubahan adalah pendekatan sistematis untuk menghadapi perubahan, baik dari perspektif organisasi maupun pada tataran individu. Menurut Champy dan Nohria, ada tiga pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya sebagai berikut: teknologi, pemerintah dan Globalisasi (Champy dan Nohria, 1996).[5]

Berdasarkan definisi manajemen perubahan dapat diketahui bahwa manajemen perubahan terkait dengan proses implementasi, dalam arti apakah ada proses *review* yang jelas dan dikelola dengan baik. Kriteria dari manajemen perubahan antara lain : **Pendekatan** dan **perubahan.**

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa manajemen perubahan diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan, kerena menajeman perubahan dapat dijadikan sebagai suatu perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi atau

[5] http://DEFINISI/def.manajemen%20perubahan.htm (13/03/2011, 21:48)

perusahaan tersebut. Adapun perencanaan dapat terwujud dengan melakukan pendekatan, sehingga dari pendekatan itulah dapat tercipta suatu perubahan.

Untuk mengetahui manajemen perubahan dari *cyber PR* yang dilakukan humas Setda Kabupaten Karawang, peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Ade Kurnia, S. Kom (Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi), memberikan jawaban tentang **pendekatan** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang terutama pada Kasubag data dan sistem informasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yakni dengan cara melakukan publikasi melalui koran, majalah dan radio untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa pemda Karawang mempunyai *website*. Selain itu, Kasubag data dan sistem informasi selalu meng-*update* informasi / data pada *website* Karawang, karena untuk melakukan **perubahan** dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat.

Sedangkan jawaban yang disampaikan **Mohamad Jaelani, S. Ag (Pelaksana / Staf Humas Bagian Pemberitaan),** tentang **pendekatan** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang khususnya oleh bagian pemberitaan yakni dengan cara melakukan sosialisasi, minggon, rapat paripurna, dan mengikuti kegiatan jadwal Bupati, Wakil Bupati, ataupun Sekretaris Daerah. Adapun untuk melakukan **perubahan** dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat, humas setda kabupaten Karawang khususnya pada bagian pemberitaan akan lebih disiplin kerja, dan menydiakan SDM yang memadai.

Berbicara mengenai manajemen perubahan dari *cyber PR*, peneliti juga melakukan wawancara dengan *key informan* untuk mengetahui lebih pasti mengenai hal tersebut. Berikut ini pendapat yang dikemukakan oleh Arief Kurnia (Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) menurut beliau **pendekatan** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang sudah sistematis, karena pengelolanya merupakan staf yang ahli dibidangnya yaitu IT (Informasi Teknologi). Heddy Yusuf nemambahkan **pendekatan** yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang sudah sistematis, karena semua itu sudah di sosialisasikan pada media publikasi, seperti radio, koran, majalah Karawang, dan kalender. Selain itu, keduanya pun menyatakan dengan adanya informasi secara elektronik / *online*, sangat dirasakan **perubahan**, karena dengan *online* dapat memperoleh berbagai kemudahan, baik dalam mencari data dan mengakses informasi secara cepat, mudah, serta akurat.

4.2.6 Eksistensi *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya.

Conny Setiawan dalam buku Kepribadian dan Etika Profesi, mengemukakan bahwa manusia hidup antara dua kutub eksistensi, yaitu kutub eksistensi individual dan kutub eksistensisosial, dimana keduanya amat terjalin dan tampaknya menjadi suatu hal yang tak terpisahkan dalam diri manusia (individualisasi dan sosialisasi). Pada suatu pihak ia berhak mengemukakan dirinya (Kutub eksistensi individual),

ingin dihargai dan diakui tetapi pada pihak lain ia harus mampu menyesuaikan diri pada ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam masyarakat didalam lingkungan sosialnya (kutub eksistensi sosial). Bila kedua kutub ini ada keseimbangan, maka ia akan mencapai suatu kondisi mental sehat". (Rismawaty, 2008 : 29).

Sedangkan Hsya mengatakan bahwa, eksistensi berasal dari kata eksis yang awal mulanya adalah kata dari bahasa Inggris exist yang berarti ada, berwujud. Eksistensi atau pengakuan, adalah suatu keadaan dimana orang lain mengakui dan menghargai diri kita, bukan merupakan wujud abstrak atau materi namun selalu dicari dan dikejar oleh manusia."[6]

Berdasarkan definisi eksistensi dapat diketahui bahwa eksistensi terkait dengan: **keberadaan, pengakuan, dan *performa*.** Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh jawaban dari informan / narasumber yaitu Ade Kurnia, S. Kom (Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi), beliau memaparkan bahwa *cyber PR sebagai e-governemnt* di pemerintah daerah kabupaten Karawang dilakukan sejak tahun 2001, sehingga dalam pengelolaannya dianggap sudah baik. **Keberadaan** *cyber PR* dilatar belakangi oleh kebutuhan yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi *online*, dimana seorang PR dituntut untuk lebih meningkatkan strateginya dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, salah satunya yaitu dengan memberikan layanan informasi secara cepat, *up to date* dan relevan.

Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Karawang berupaya untuk mendapatkan **pengakuan** dari masyarakat. Adapun berdasarkan hasil wawancara

[6] http://nasanti.multiply.com/journal/item/7/eksistensi

dengan masyarakat sebagai *key informan* yaitu Heddy Yusuf, beliau mengakui bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang mengetahui adanya *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang). Masyarakat mengakui dengan adanya *cyber PR* dapat memperoleh banyak **manfaat**.

Manfaat tersebut merupakan hasil kerja humas setda kabupaten Karawang yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara **efisien**, sehingga masyarakatpun dapat melakukan **partipasi** dalam bentuk penyampaian pendapat, saran, ataupun keluhan-keluhan dan pengambilan keputusan. Adapun dalam memberikan atau menyampaikan informasi Pemerintah Derah Kabupaten Karawang berusaha menyampaikannya secara **transparansi**, hal tersebut disesuaikan dengan prinsip pemda Karawang yaitu melayani masyarakat sebaik mungkin terutama pada layanan informasi. Selain itu dalam **manajemen perubahan** Pemerintah Derah Kabupaten Karawang melakukan sosialisasi dan publitas untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa pemda Karawang mempunyai *website*.

Eksistensi seseorang dapat dilihat dari ***Performa*** atau penampilannya, begitupun eksistensi organisasi / perusahaan, sehingga eksistensi *cyber PR* sebagai *e-government* di pemerintah daerah kabupaten Karawang dapat diukur dari *performa*-nya yaitu berupa hasil kerja atau kinerja pemda Karawang sendiri. Dari hasil wawancara dengan *key informan* yaitu Iskandar Guna mengatakan bahwa hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Karawang terutama pada bagian humas sudah cukup baik, karena dalam memberikan pelayanan terutama layanan informasi bagi masyarakat, pemda Karawang berupaya menyesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut informan hasil kerja yang dilakukan pemda karawang dianggap sudah sangat baik, karena dalam pelayanan informasi pemda karawang sudah cukup transparan, yakni menyediakan data berupa data-data hasil pembangunan, produk hukum, sosialisasi, dan informasi pengadaan barang dan jasa.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada Sub Bab ini peneliti akan membahas hasil penelitian berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dan data-data yang diperoleh selama masa penelitian.

Bagi masyarakat sendiri sudah cukup banyak yang mengetahui adanya *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang) yang dijadikan sebagai media publikasi untuk memberikan layanan informasi bagi masyarakat khususnya mengenai pemberitaan tentang kabupaten Karawang. Adapun *cyber PR* di pemerintah daerah kabupaten Karawang tidak hanya digunakan sebagai media informasi saja, tetapi digunakan juga sebagai media publikasi untuk menunjang kinerja para pegawai terutama bagi staf humas Setda kabupaten Karawang.

Masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana **eksistensi** *cyber PR* sebagai *e-government* di pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam penyampaian informasi bagi masyarakat, dimana hal tersebut dapat diukur dari indikator berdasarkan lima dimensi dalam *balanced e-Government scorecard* yang masing-

masing dijabarkan dalam berbagai kriteria secara lebih detil. Dimana kelima dimensi tersebut peneliti jadikan sebagai sub fokus dari eksistensi, yang dikemukakan oleh Stiftung, 2001 (dalam Indrajit, Indrajit, 2005 : 43) yaitu : **manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi,** dan **manajemen perubahan**.

4.3.1 Manfaat dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Manfaat *cyber PR* sudah terasa ke dalam dunia PR dan tentunya sudah tidak ada lagi batasan bagi seorang PR dalam menyapaikan informasi, baik itu kebijakan perusahaan, peluncuran produk baru ataupun yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Dengan *cyber PR* semua penyampaian informasi akan berjalan dengan baik. Disini dibuktikan bahwa media online sangat mendukung peran bagi seorang PR dalam menjalankan tugasnya. Dengan media *online* itulah seorang PR dapat menambah wawasan di dalam dunia kerja, karena untuk mengaksesnya dapat dilakukan dimana saja selagi masih terhubung dengan koneksi. Sehingga tidak ada lagi batasan antara ruang dan waktu dalam lingkup kerja seorang PR.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Mohamad Jaelani yang mengungkapkan bahwa keuntungan *cyber PR* (*website* Karawang) bagi masyarakat sendiri adalah masyarakat dapat memperoleh bahkan memberikan informasi dengan cepat, dapat dilakukan kapan dan dimana saja, serta dari informasi yang diperoleh

dapat menjadi inspirasi bagi peluang usaha ekonomi rakyat, sehingga dari keuntungan tersebut masyarakat dapat merasakan keterbukaan, serta berbagai jenis informasi dan masalah. (Mohamad Jaelani, Hasil Wawancara : 17 Juni 2011).

Ade Kurnia, S. Kom menambahkan bahwa manfaat *cyber PR* (*website* Karawang) bagi pemda Karawang sendiri adalah dapat memberikan keuntungan sebagai media informasi bagi para pegawai terutama bagi staf humas, baik dalam perolehan atau penyampaian informasi kepada masyarakat terutama dalam menyampaikan hasil-hasil pembangunan, informasi / pengumuman yang bersifat urgen, sosialisasi, produk-produk hukum, dan perizinan. (Ade Kurnia, Hasil Wawancara : 7 Juni 2011).

Artinya dari kedua pertnyataan di atas, dapat diketahui bahwa maraknya penggunaan media sosial atau *online* mau tidak mau memaksa seorang PR untuk lebih meningkatkan model berkomunikasinya. Sifat yang interktif itulah yang menjadikanseorang PR terlihat sangat baik dalam hal berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan berbagai media.

Hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh seorang PR, namun masih ada hal yang menjadi hambatan bagi perkembangan seorang PR itu sendiri, kadang publik membutuhkan sesuatu yang nyata dan dapat dipercaya disbanding dunia maya yang disuguhkan seperti internet, dan tidak semua publik itu mengerti bagaimana menggunakan internet, dan bahkan masih banyak sekelompok masyarakat yang kesusahan dan belum bisa menggunakan internet. Oleh karena itu, yang mereka

butuhkan adalah sosialisasi mengenai penggunaan internet secara umum, terutama dalam penggunaan dan pemenfaatan *cyber PR* (*website* Karawang).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994 : 858), kata manfaat diartikan sebagai "guna, faedah, laba, untung". Sehingga manfaat berdasarkan pengertiannya masing adalah "guna, faedah, laba, untung yang didapat dari perihal mempraktikkan atau hasil kerja menerapkan.[7]

Berbicara tentang **manfaat** berbagai kelompok di masyarakat mengatakan bahwa banyak manfaat dari adanya *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang), karena setelah mengunjungi *website* Karawang masyarakat dapat memperoleh banyak keuntungan seperti menambah pengetahuan dan memperoleh berbagai keunggulan kabupaten Karawang, serta banyak layanan yang dapat diakses secara cepatseperti halnya masyarakat dapat memperoleh dan mencari informasi tentang potensi kabupaten Karawang, baik tentang topografi, rencana kegiatan, dan prestasi yang telah dicapai kabupaten Karawang.

Adapun masyarakat juga mengakui dari informasi yang diperoleh terdapat kegunaan, salah satunya yaitu dapat dijadikan sebagai sumber informasi, karena *website* Karawang menyediakan berbagai macam informasi yang relevan terutama tentang berita-berita kabupaten Karawang, baik dibidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, serta sumber daya alam dan SDM yang dituangkan di dalam program-program pemerintah kabupaten Karawang.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dari *cyber PR* dapat diperoleh manfaat yang disertai dengan keuntunga-keuntung serta kegunaan dari informasi yang

[7] http:// DEFINISI/def.manfaat.htm (13/03/2011, 21:46)

diperoleh. Namun disamping itu, perlu diketahui bahwa *cyber PR* dapat dimanfaatkan sebagai media *online* yang mampu memberikan potensi-potensi besar seperti menciptakan komunikasi yang konstan, dua arah, cepat, mampu menjangkau khalayak secara lebih luas, biaya lebih hemat dan efisien. Dengan adanya *cyber PR* humas dapat melewati batasan penghalang seperti jarak dan waktu, sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan informasi atau berita secara langsung kepada target publik. Hal itu sesuai dengan manfaat-manfaat dari E-PR yang dikutip dalam buku Bop Julius Onggo, 2004 : 4-5 berikut ini :

a. Komunikasi Konstan

Internet bagaikan satpam atau sekretaris yang tidak pernah tidur dengan potensi target publik seluruh dunia.

b. Respons yang cepat

Internet memungkinkan PR untuk merespon secara cepat dan erta merta terhadap semua permasalahan dan pertanyaan prospek maupun publik.

c. Pasar Global

Internet telah menutup jurang pemisah geografis (kecuali psikologis) setelah sesorang terhubung dengan dunia *online*. Setiap orang dapat langsung berkomunikasi dengan pasar dibelahan dunia manapun dengan biaya yang sangat minim.

d. Interaktif

Karena internet sangat interaktif, PR akan tetap mendapatkan *feedback* dari publik atau pengunjung situs *web* (*website*) dari PR tersebut, sehingga dari hal itulah PR dapat mengetahui apa yang diinginkan publik.

e. Komunikasi Dua Arah

Komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik adalah tujuan utama aktivitas E-PR, karena hal tersebut akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung oleh media *offline*.

f. Hemat

E-PR dapat membantu suatu organisasi atau perusahaan lebih hemat, karena dengan E-PR tidak lagi dibutuhkan *stationery* maupun biaya cetak. Adapun saat ini biaya internet sudah semakin murah, sehingga biaya E-PR akan semakin terjangkau. (Bop Julius Onggo, 2004 : 4-5).

Dari potensi-potensi yang disebutkan dapat diketahui kelebihan dari *cyber PR* antara lain:

1. Seorang praktisi PR tidak harus menemui klien atau bergantung kepada suatu media sebagai perantara mereka untuk melakukan kegiatan kehumasannya. Cara seperti ini juga dapat lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.

2. Sasaran dari PR juga pasti tepat, karenakhalayak yang merasa membutuhkan suatu informasi akan mencari sendiri informasi itu. Disini khalayak dituntut untuk lebih aktif.
3. *PR cyber* ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, khalayak dapat memperoleh informasi dimana pun dia berada dan kapanpun,selama 24 jam *nonstop*. Tidak seperti suatu instansi yang tutup pada jam dan hari tertentu.

Sementara pemanfaatan *cyber PR* di pemerintah daerah Kabupaten Karawang merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh humas setda kabupaten Karawang melalui *cyber PR*, dimana hasil kerja tersebut terbagi atas tugas pokok bagian masing-masing yakni bagian data dan sistem informasi, pemberitaan, serta dokumentasi. Salah satu hasil kerja dari bagian data dan sistem informasi adalah mengelola *website* serta melakukan proses *update* data.

Data yang didapatkan berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana data tersebut harus melalui proses *Update* data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Membuat surat *update* data dan surat permohonan
- Surat *update* dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Tunggu balasan pengiriman dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Setelah diterima kembali di kantor Humas Setda Kabupaten Karawang, maka data *update* juga diproses kembali oleh staf Humas bagian data dan sistem informasi, dengan cara : Direkap (diketik ulang), *entre* data, pengeditan, *entre* data lagi, *preview*, dan yang terakhir *report* (dapat

berupa tampilan dalam *website* Karawang / print).

Disamping itu, mengingat bahwa tugas pokok bagian data dan sistem informasi adalah membantu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam pengelolaan kegiatan bidang data dan informasi. Maka pelaksanaan tugas pokok bagian Data dan Sistem Informasi, mempunyai fungsi sebagai :

a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang data dan sistem informasi.
b. Pengumpulan dan pengolahan data.
c. Pengelolaan sistem informasi.

Adapun hasil kerja pada bagian pemberitaan yang dilakukan dalam *cyber PR*, salah satunya yaitu membuat majalah kabupaten Karawang secara cetak / *online*. Sementara hasil kerja pada bagian dokumentasi adalah menyediakan dan menyimpan foto-foto kegiatan pemerintah daerah kabupaten Karawang, arsip-arsip, serta video kegiatan.

Dari hasil kerja yang dilakukan humas setda kabuapten Karawang itulah, masyarakat dapat memperoleh berbagai keuntungan dari adanya *cyber PR*, dan masyarakat pun dapat mengetahui apa saja kegunaan dari informasi atau data yang disampaiakan pada *cyber PR* tersebut.

4.3.2 Efisiensi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Adanya teknologi internet dalam dunia khususnya dunia PR sangat membantu, karena teknologi ini dapat membantu seorang PR untuk lebih cepat menginformasikan berita atau pesan-pesan pada khalayak dengan cepat dan efisien. Efisiensi disini menyangkut bagaimana teknologi mengurangi proses kerja, baik dari sisi waktu, peningkatan kualitas serta produktivitas, karena efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Menurut Mulyamah (1987 : 3), efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam lain penggunaan yang sebenarnya.[8]

Merujuk pada **efisiensi** dari adanya *cyber PR*, pemerintah daerah kabupaten Karawang dapat dikatakan lembaga yang efisien dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam pengelolaannya didasari dengan rencana dan realisasi untuk meningkatkan layanan. Hal itu dapat dilihat dari pelayanannya terutama pada layanan informasi bagi masyarakat. Proses yang cepat dan meningkatkan kualitas layanan merupakan cara yang dilakukan pemda Karawang untuk memberikan **efisiensi**, karena dengan efisiensi dapat memberikan kemudahan, baik bagi masyarakat atau pemda Karawang sendiri.

[8] http://DEFINISI/def.efisien.htm (13/03/2011, 21:46)

Pendapat masyarakat tentang kemudahan yang diperoleh dari adanya *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang) yaitu dapat memperoleh informasi khususnya tentang berbagai keunggulan dan permasalahan serta program kerja kabupaten Karawang secara cepat dan akurat. Artinya untuk memperoleh informasi tersebut masyarakat dapat langsung mengaksesnya, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, sehingga dapat dilakukan kapan dan dimana saja sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pendapat masyarakat di atas pada dasarnya dapat membuktikan bahwa keberadaan *cyber PR* (*website* Karawang) memang memberikan efisiensi baik bagi masyarakat atau pemda Karawang sendiri. Sehingga peningkatan kualitas layananpun dapat dirasakan masyarakat.

Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Oleh karena itu, agar efisiensi dapat tetap terlaksana dengan baik, maka bagi pengelola yaitu humas setda kabupaten Karawang harus selalu memberikan pelayanan yang lebih baik terutama pada layanan informasi.

Dari hasil wawancara dengan Ade Kurnia, S. Kom sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi), mengemukakan dengan adanya *cyber PR* bagi pemda Karawang khususnya staf humas dapat memperoleh kemudahan dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik mengenai hasil-hasil pembangunan, sosialisasi, ataupun informasi pengembangan barang dan jasa.

Adapun informasi tersebut merupakan berita pokok dari pemerintah daerah kabupaten Karawang, sehingga dalam menyebarkan informasi harus dilakukan secara lebih cepat dan akurat agar masyarakat dapat mengetahui perubahan dari pemberitaan yang terjadi, khususnya mengenai kabupaten Karawang. Namun perlu diketahui bahwa dalam perencanaan pada keseluruhan aspek pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia belum maksimal, karena *website* Karawang perlu di *update* setiap tahun untuk disesuaikan dengan kebutuhan.

Oleh karena itu, rencana selanjutnya yang dilakukan humas setda kabupaten Karawang dalam pengelolaan *cyber PR* sebagai *e-government* adalah melakukan *update* data setiap hari, adapun data yang diperoleh dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) setiap tanggal 15, menyiapkan para staf / SDM yang memadai, serta menyesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Untuk merealisasikan *cyber PR* sebagai *e-government* kepada masyarakat, humas setda kabupaten Karawang melakukan penyebaran informasi / sosialisasi melalui koran, majalah pemda Karawang, radio, dan kalender, melakukan *road show*, *talk show*, serta menyiapkan program dan anggaran. (Ade Kurnia, Hasil Wawancara : 7 Juni 2011).

Hal tersebut dilakukana oleh humas setda kabupaten Karawang sebagai upaya atau strategi untuk lebih mengoptimalkan efisiensi penggunaan *cyber PR*. Upaya untuk mengoptimalkan efisiensi tersebut tentu saja harus didasari dengan perencanaan, karena untuk menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dihasilkan. sehingga dalam upaya mengoptimalkan efisiensi diperlukan suatu realisasi kepada masyarakat.

Berbicara mengenai realisasi, masyarakat berpendapat bahwa realisasi yang dilakukan humas setda kabupaten Karawang dianggap sudah cukup baik, meskipun masyarakat seringkali mengatakan bahwa data-data yang di informasikan pada *website* Karawang kurang *up to date*. Hal tersebut tentu saja perlu diketahui oleh humas setda kabupaten Karawang agar dapat diperbaiki. Sehingga humas sendiri dapat menyusun rencana kedepan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan itu.

Adapun untuk menyusun rencana tersebut dapat disesuaikan dengan kriteria efisiensi yang dikutip dari buku Richardus Eko Indrajit, yakni dengan :

1. Menyediakan arsitektur proses, aplikasi, dan database yang bisa berjalan baik ketika dbutuhkan / digunakan.
2. Merencanakan sumber daya dan keuangan secara baik.
3. Memanfaatkan sistem teknologi informasi semaksimal mungkin pada keseluruhan aspek.
4. Mengadakan pelatihan bagi para staf dan pegawai. (Richardus, 2005 : 43).

Selain itu, efisiensi dari adanya *cyber* PR juga dapat meminimalisirkan anggaran biaya baik bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah kabupaten Karawang, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Mohamad Jaelani bahwa dengan adanya *cyber* PR, pemda Karawang dalam pengelolaan modal maupun biaya anggaran dapat dilakukan secara terencana, sehingga biaya dapat diminimalisirkan terutama dalam melakukan kegiatan penyampaian informasi bagi masyarakat. Sementara bagi masyarakat, untuk memperoleh informasi melalui *cyber* PR dapat dilakukan dengan cara lebih hemat, karena biayanya relatif murah.

4.3.3 Partisipasi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelstarian sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan.

Dalam hal partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, secara umum masih sulit untuk mewujudkan *e-democracy* dimana masyarakat mampu memberikan banyak pilihan dan proses pengambilan keputusan secara *online*. Kondisi tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu : Pemerintah memang belum siap dan masyarakatpun belum terbiasa, sehingga tuntutan kearah sana belum banyak dilakukan. Namun dengan keberadan *cyber PR* (*website* Karawang) menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Karawang sudah siap dengan kondisi tersebut, artinya pemerintah sudah siap dengan usulan, kritikan, dan keluhan dari masyarakat yang disampaikan melalui media *online*.

Layanan yang tersedia pada *website* Karawang, pada dasarnya bertujuan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memberikan **partisipasi,** baik dalam penyampaian pendapat, masukan atau proses pengambilan keputusan. Salah satu partisipasi dari masyarakat yaitu adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan untuk memperoleh informasi melalui *website*. Biasanya

masyarakat mengunjungi *website* Karawang untuk mencari data atau berita tentang kabupaten Karawang.

Keikutsertaan masyarakat pada *website* Karawang dapat dikatakan cukup baik, karena jumlah pengunjung *website* tersebut cukup banyak. Masyarakat mengakui banyak potensi yang dapat diperoleh dari adanya *website* Karawang, diantaranya adalah dapat mengetahui berbagai informasi tentang kabupaten Karawang dan memperoleh data-data yang diperlukan.

Namun dengan adanya partisipasi masyarakat, seringkali masyarakat menemukan masalah terutama tentang *website* Karawang sendiri. Salah satu contoh permasalahannya yaitu tentang data-data yang kurang *update*. Adapun permasalahan tersebut ada yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada humas Setda kabupaten Karawang ada juga yang tidak.

Dari permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan penggunaan layanan pada *cyber PR* (*website* Karawang), artinya masyarakat tidak memahami secara keseluruhan dari layanan *cyber PR* (*website* Karawang) tersebut. Adapun pada dasarnya perlu diketahui oleh masyarakat bahwa humas Setda kabupaten Karawang telah menyediakan wadah untuk menampung segala permasalahan atau keluhan dari masyarakat yaitu dengan cara mengirim *SMS Gateway* ke No. 085890624444, atau menyampaikan langsung permasalahan / keluhan tersebut melalui buku tamu yang tersedia pada layanan *website* Karawang.

Wadah / layanan tersebut disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten Karawang untuk menampung segala usulan, kritikan, dan keluhan dari masyarakat. Sehingga melalui wadah tersebut pemda Karawangpun dapat memberikan jawaban / *feedback* kepada masyarakat. Adapun pada dasarnya semua itu ditujukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam *cyber PR* (*website* Karawang).

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa partisipasi itu memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung, seperti halnya dalam proses evaluasi perubahan dari *website* Karawang yaitu masyarakat melibatkan dirinya melalui penyampaian kritik, saran dan masukan. Hal itu merupakan cara yang dapat membangun kinerja pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan secara lebih baik lagi. Keterlibatan lain dari masyarakat yaitu masyarakat mengikuti setiap perubahan *update* informasi *website* Karawang, dalam arti masyarakat tersebut mengikuti perkembangan dari informasi yang ada.

Uraian di atas pada dasarnya sesuai dengan definisi partisipasi masyarakat, dimana menurut Isbandi (2007 : 27) partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.[9]

Sehingga dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat memang memerlukan keterlibatan masyarakat, namun perlu diketahui keuntungan dan kerugian dari

[9] http://DEFINISI/def.partisipasi.htm (13/03/2011, 21:50)

partisipasi masyarakat tersebut. Dengan mengacu pada berbagai referensi (Anon, 2000; Blumenthal, 2000, Dovers, 2000; Kapoor, 2001; serta UNDP, 2000), Thomsen (2003) memaparkan keuntungan dan kerugian dari partisipasi masyarakat. Keuntungan dari partisipasi masyarakat adalah:

1. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dengan mengajak masyarakat dengan spektrum yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan, maka partisipasi dapat: (a) meningkatkan representasi dari kelompok-kelompok komunitas, khususnya kelompok yang selama ini termarjinalisasikan, (b) membangun perspektif yang beragam yang berasal dari beragam *stakeholders*, (c) mengakomodir pengetahuan lokal, pengalaman, dan kreatifitas, sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternatif.
2. Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*. Dengan melibatkan *stakeholders* dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan menerima atau berpotensi menerima akibat dari suatu kegiatan / proyek, hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu / masalah.
3. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan interaktif dan siklikal dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan

memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih efektif.

4. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil (*outcomes*) yang berkelanjutan dengan menfasilitasi kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarah pada keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif lebih mungkin untuk diterima oleh seluruh *stakeholders*.
5. Partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan pengetahuan dari tiap *stakeholders* tentang kegiatan / aksi yang dilakukan oleh stakholders lain. Pengetahuan ini dan ditambah dengan peningkatan interaksi antar sesama *stakeholders* akan meningkatkan kepercayaan diantara para stakeholders dan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan modal sosial.

Sedangkan kerugian yang mungkin muncul dari pendekatan partisipatif adalah:

1. Proses partisipasi dapat digunakan untuk memanipulasi sejumlah besar warga masyarakat. Partisipasi secara sadar atau tidak sadar dapat merugikan kepada mereka yang terlibat jika: (a) para ahli yang melakukan proses ini memanipulasi partisipasi publik untuk kepentingannya, (b) jika tidak direncanakan secara hati-hati, partisipasi dapat menambah biaya dan waktu

dari sebuah proyek tanpa ada jaminan bahwa partisipasi itu akan memberikan hasil yang nyata.

2. Partisipasi dapat menyebabkan konflik. Proses partisipasi seringkali menyebabkan ketidakstabilan hubungan sosial politik yang ada dan menyebabkan konflik yang dapat mengancam terlaksananya proyek.
3. Partisipasi dapat menjadi mahal dalam pengertian bahwa waktu dan biaya yang dikeluarkan dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal bagi masyarakat lokal. Pada wilayah-wilayah dimana di dalamnya terdapat ketidakadilan sosial, proses partisipasi akan dilihat sebagai sesuatu yang mewah dan pengeluaran-pengeluaran untuk proses itu tidak dapat dibenarkan ketika berhadapan dengan kemiskinan yang akut.
4. Partisipasi dapat memperlemah (*disempower*) masyarakat. Jika proses partisipasi dimanipulasi, tidak dikembangkan dalam kerangka kerja institusional yang mendukung atau terjadi kekurangan sumber daya untuk penyelesaian atau keberlanjutan suatu proyek, maka partisipan dapat meninggalkan proses tersebut, kecewa karena hanya sedikit hasil yang diraih, padahal usaha yang dilakukan oleh masyarakat telah cukup besar. [10]

[10] http://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/partisipasi/

4.3.4 Transparansi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Transparansi merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha. Prinsip ini menjamin adanya pengungkapan ataupun keterbukaan segala informasi yang berkaitan dengan performance serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan badan usaha secara tepat waktu dan akurat.[11]

Pengertian transparansi memberikan suatu petunjuk agar pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip transparansi merupakan pelaksanaan keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak terkait atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan padanya.

Prinsip ini terutama berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan ataupun program yang telah ditetapkan. Transparansi mempunyai karakteristik:

a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan;

b. Penentuan standard yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan;

c. Mendorong penerapan atau pemakaian standarisasi;

Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari warga.

---

[11] Adri Mustiko, Peran Prinsip Transparansi dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* pada Perseroan Terbatas Terbuka, dikutip dari buku *Corporate Governance* oleh Tager I. Nyoman (Tesis, 2005).

Transparansi / keterbukaan merupakan syarat untuk sempurnanya pertanggungjawaban. Ada hubungan antara keterbukaan dan pertanggungjawaban. Lebih dulu dituntut adanya sikap keterbukaan supaya pertanggungan kerja lebih terjamin pembuktiannya. Jika karakternya tertutup, maka sulit diharapkan adanya penanggungjawaban dan yang dapat diketahui semua pihak, termasuk pengawas.

Transparansi Negara ini secara melembaga ada pihak eksekutif yeng berkewajiban memberikan pertanggungjawaban atas segala beban kinerja eksekutif sebagai pelaksanaan kebijakan, rencana-rencana strategis dan realisasi semua mata anggaran belanja. Adapun yang diharapkan oleh publik atau masyarakat ialah baik lembaga eksekutif atau legislatif masing-masing serius dalam fungsinya, dimana lembaga eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan pertanggungjawaban secara terbuka (transparan), sedangkan lembaga legislatif dapat melakukan fungsi kontrol secara sungguh-sungguh. Demikian hendaknya di pusat maupun di daerah.

Ade Kurnia mangungkapkan pemerintah daerah kabupaten Karawang, dalam memberikan informasi berusaha menyampaikannya secara **transparansi**, hal tersebut disesuaikan dengan prinsip pemda Karawang sendiri yaitu melayani masyarakat sebaik mungkin, terutama pada layanan informasi, salah satunya yaitu dengan memberikan layanan informasi yang *up to date* dan relevan. (Ade Kurnia, Hasil Wawancara : 7 Juni 2011).

Berbicara mengenai transparansi, peniliti menemukan adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa pemerintah daerah kabupaten Karawang belum terbuka atau transparan dalam

memberikan informasi, karena informasi yang diberikan kepada masyarakat hanya sebatas informasi / berita yang positif saja. Adapun beberapa kelompok masyarakat lain juga berpendapat bahwa pemerintah daerah kabupaten Karawang sudah sangat terbuka meskipun tidak semua bagian dapat diperoleh, kemungkinan hal tersebut disebabkan karena belum lengkapnya pendataan seperti informasi antar kecamatan dan daerah-daerah pelosok kabupaten Karawang di semua sektor.

Meskipun dalam transparansi masih menimbulkan pro kontra, pemda Karawang merasa bahwa keterbukaan pemerintah daerah kabupaten Karawang dalam memberikan informasi mengenai *performance*-nya sudah transparan, karena pemda Karawang memberikan informasi dengan jelas mengenai layanan dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Adapun informasi yang diberikan hanya sebatas hasil kerja pemerintah yang di informasikan melalui ILPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), dan informasi tersebut ditampilkan pada *website* Karawang selama satu bulan.

Hal tersebut diyakini oleh humas setda kabupaten karawang, karena sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan pada masyarakat terutama tentang layanan informasi secara transparan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diketahui bahwa tujuan dari transparansi sendiri adalah :

1. Untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui kontrol sosial.
2. Menghindari *miss-communication* ataupun salah persepsi.
3. Mendorong proses masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

4. Membangun kepercayaan setiap pihak terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.
5. Agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai-nilai universal.[12]

4.3.5 Manajemen Perubahan dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah "penolakan atas perubahan itu sendiri". Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan (***resistance to change***). Penolakan atas perubahan tidak selalu negative justru karena adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pengertian Manajemen perubahan didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk menghadapi perubahan, baik dari perspektif organisasi maupun pada tataran individu. Menurut Champy dan Nohria, ada tiga pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya sebagai berikut: teknologi, pemerintah dan Globalisasi (Champy dan Nohria, 1996).[13]

Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, tanpa adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi dan

---

[12] Modul-Transparansi-Akutabilitas. pdf - Foxit Reader – [Modul-Transparansi-Akutabilitas. Pdf] (16 Juni 2011, 17.45)

[13] http://DEFINISI/def.manajemen%20perubahan.htm (13/03/2011, 21:48)

dibidang pelayanan informasi masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas.

Untuk mengetahui proses *review* yang jelas dan pengelolaan dengan baik, maka diperlukan **manajemen perubahan**, karena semua itu terkait dengan proses implementasi. Dari hasil wawancara dengan Mohamad Jaelani, diketahui bahwa Humas Setda kabupaten Karawang melakukan pendekatan sebagai proses manajemen perubahan yakni dengan cara melakukan sosialisasi, minggon, rapat paripurna, dan mengikuti kegiatan jadwal Bupati, Wakil Bupati, ataupun Sekretaris Daerah, serta melakukan publikasi melalui koran, majalah dan radio untuk menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa pemda Karawang mempunyai *website*. Adapun untuk melakukan perubahan dalam memberikan layanan informasi bagi masyarakat, humas setda kabupaten Karawang dengan melakukan disiplin kerja, dan menyediakan SDM yang memadai, serta selalu meng-*update* informasi / data pada *website* Karawang. (Mohamad Jaelani, Hasil Wawancara : 7 Juni 2011).

Berdasarkan pernyataan di atas, pendekatan yang dilakukan humas setda kabupaten Karawang merupakan pendekatan dalam perubahan hasil. Dimana pendekatan dalam perubahan hasil (*Achieving result*) / *Cognitif approach*, Pendekatan kognitif (Cognitif Approach) ini menjelaskan tentang bagaimana mencapai hasil melaui *refragming* positif, teknik ini terkait penetapan tujuan dan pembinaan untuk dapat mencapai hasil. Adapun dari pendekatan itu ditujukan sebagai proses perubahan yang mengarah pada titik positif, dimana humas menjadikan pendekatan tersebut sebagai alat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Dalam hal ini masyarakatpun berpendapat bahwa pendekatan yang dilakukan humas setda kabupaten Karawang dalam memberikan informasi melalui *website* sudah sistematis, karena sudah di sosialisasikan pada media publikasi, seperti radio, koran, majalah Karawang, dan kalender. Selain itu, masyarakat juga mengatakan bahwa dengan adanya informasi secara elektronik / *online* dapat dirasakan perubahan, karena dengan media *online* dapat memperoleh kemudahan dalam mencari data dan mengakses informasi secara cepat, mudah, serta akurat.

Sehingga humas setda kabupaten Karawang dalam melakukan pendekatan di anggap cukup baik, karena dari manajemen perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Hal tersebut sesuai pendapat masyarakat yang telah dikemukakan di atas.

4.3.6 Eksistensi dari *Cyber PR* Sebagai *E-Government* Di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dalam Penyampaian Informasi Bagi Masyarakatnya

Untuk mengetahui bagaimana **eksistensi** *cyber PR sebagai e-governemnt* di pemerintah daerah kabupaten Karawang, dapat diketahui dari keberadaan *cyber PR* itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan Ade Kurnia keberadaan *cyber PR sebagai e-governemnt* di pemerintah daerah kabupaten karawang dalam penggelolaannya dianggap sudah cukup baik, karena sudah ada sejak tahun 2001. Masyarakat juga

sudah banyak yang mengetahui keberadaan/ adanya *cyber PR sebagai e-governemnt* (*website* Karawang).

Hal yang sama di ungkapkan oleh Heddy Yusuf, beliau berpendapat bahwa sudah cukup banyak masyarakat yang mengetahui adanya *cyber PR* sebagai *e-government* (*website* Karawang). selain itu, masyarakat mengakui dengan adanya *cyber PR* mereka dapat memperoleh banyak manfaat. (Heddy yusuf, Hasil Wawancara : 7 Juni 2011)

Berdasarkan hasil penelitian keberadaan *cyber PR* di pemerintah daerah kabupaten Karawang adalah untuk memberikan manfaat, efisiensi, partisipasi, transparansi serta manajemen perubahan, baik bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah kabupaten Karawang sendiri. Berikut ini yang dapat diperoleh dari adanya *cyber PR* (*website* Karawang):

1. Manfaat : Dari manfaat dapat diperoleh keuntungan, kegunaan, serta mengetahui hasil kerja dari *cyber PR* tersebut.
2. Efisiensi : Dari efisiensi dapat diperoleh kemudahan, mengetahui perencanaan / rencana dari *cyber PR*, serta mengetahui realisasi yang dilakukan pada *cyber PR*.
3. Partisipasi : Dari partisipasi dapat diperoleh potensi, solusi, mengetahui bagaimana keikutsertaan dan keterlibatan pada *cyber PR*.
4. Transparansi : Dari transparansi dapat diperoleh keterbukaan, dan dapat mengetahui bagaimana prinsip pada *cyber PR*.

5. Manajemen Perubahan : Dari Manajemen Perubahan dapat diperoleh perubahan, dan mengetahui bagaimana pendekatan yang dilakukan dari *cyber PR.*

Dengan keberadaan *PR cyber* praktisi PR dapat menerima *feedback* secara langsung dan lebih cepat dari khalayaknya. Dengan ini praktisi PR dapat semakin mengoptimalkan kegiatan *cyber public relations* meskipun keberadaannya yang masih baru agar semakin eksis, dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan koordinasi untuk mempersiapkan kader humas dan petugas humas yang ada yang berkenaan dengan teknologi informasi dan media internet meminimalisir faktor penghambat dengan strategi dan rencana yang matang dengan melakukan koordinasi bersamadan semakin mensupport agar faktor pendukung yang ada semakin berkembang serta semakin mengoptimalkan *cyber public relations* agar di dapat manfaat-manfaat yang lain yang lebih dari sebelumnya.

Adapun eksistensi dalam sebuah blog milik Hsya mengatakan bahwa: "Eksistensi berasal dari kata eksis yang awal mulanya adalah kata dari bahasa Inggris exist yang berarti ada, berwujud. Eksistensi atau pengakuan, adalah suatu keadaan dimana orang lain mengakui dan menghargai diri kita, bukan merupakan wujud abstrak atau materi namun selalu dicari dan dikejar oleh manusia."[14]

Eksistensi suatu perusahaan / organisasi dapat dilihat dari ***Performa,*** karena pada dasarnya eksistensi seseorang dapat dilihat dari ***Performa*** atau penampilannya, sehingga eksistensi *cyber PR* sebagai *e-government* di pemerintah daerah kabupaten Karawang dapat diukur dari *performa*-nya yaitu berupa kinerja atau hasil kerja pemda

[14] http://hsya.blogspot.com/2009/01/perempuan-dan-eksistensi-diri.html

Karawang sendiri. Adapun hasil kerja yang dilakukan pemda karawang dianggap sudah sangat baik, karena dalam pelayanan informasi pemda karawang sudah cukup transparan, yakni menyediakan data berupa data-data hasil pembangunan, produk hukum, sosialisasi, dan informasi pengadaan barang dan jasa.

Istilah *E-public relations* mungkin masih sulit dicerna bagi para praktisi Kehumasan Indonesia. *E-public relations* adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia Internet. Seluruh kegiatan kehumasan dapat dilakukan didalam internet dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan *customer relations management* juga dapat dilakukan di pada *cyber PR*.

Oleh karena itu, menurut peneliti yang dapat dilakukan Humas dalam melakukan kegiatan kehumasan di *cyber PR* antara lain :

1. **Publikasi**

   Kegiatan publikasi yang di lakukan Humas dalam internet dapat dilakukan dengan jalan mengikuti *mailing list* yang sesuai dengan target market perusahaan kita. Banyaklah menuliskan tulisan berupa artikel, *press release* mengenai perusahaan atau organisasi dalam *release* tersebut. Dengan begitu seluruh anggota akan kena terpaan publikasi yang telah Humas lakukan.

   Selain mengikuti *mailing list* yang sesuai dengan target market perusahaan, humas juga harus secara berkesinambungan memproduksi *e-newsletter* kepada member *website* perusahaan organisasi. Tetapi, jangan sekali-kali melakukan *spamming* terhadap pengguna internet,

karena dengan melakukan *spamming*, kredibilitas perusahaan atau organisasi akan hancur, karena *spamming* adalah kegiatan berkonotasi negatif bagi pengguna internet, *spamming* bisa dikatakan sebagai kegiatan yang memaksakan kehendak dalam memberikan informasi. Jalan yang paling aman adalah mengirimkan *newsletter* pada anggota *website* anda yang secara sukarela mendaftarkan alamat emailnya untuk dikirimkan informasi tentang perusahaan organisasi yang bersangkutan.

2. Menciptakan Berita (Media Relations)

Untuk menjaga hubungan baik dengan wartawan dapat dilakukan melalui *email*, jika seorang humas mempunyai *database* alamat *email* seorang wartawan akan lebih sangat mudah dalam mengirimkan siaran *pres*. Jika perusahaan atau organisasi mempunyai siaran *pres* yang butuh disampaikan dengan segera, dapat dilakukan dengan sekali "klik" maka siaran *pres* tersebut akan langsung sampai di meja wartawan.

Adapun untuk tetap menjaga hubungan baik, praktisi humas bisa menyapa wartawan tersebut lewat *email* menanyakan kabar wartawan tersebut dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Apalagi jika sudah sangat akrab dengan wartawan tersebut maka dapat melakukan wawancara / konferensi dengan menggunakan *Instant Messenger* seperti *Yahoo Messenger, ICQ*, atau yang lainnya.

> Keuntungan melakukan kegiatan media relations dengan Internet adalah anda sebagai seorang humas sangat memudahkan para kuli tinta tersebut melakukan pekerjaannya. Bayangkan jika mereka harus melakukan wawancara dengan mendatangi kantor anda, akan membuang waktu perjalanan yang cukup lama. Tetapi jika melakukan wawancara dengan melalui *Instant Messenger*, kerja para wartawan akan lebih mudah, hanya duduk di meja mereka, *login*, dan langsung dapat wawancara. Hasil wawancara langsung dapat dirangkum dalam bentu *teks* yang dapat diformat dalam *MS word*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka eksistensi dari *cyber PR* harus lebih ditingkatkan, adapun pada pemerintah daerah kabupaten Karawang *cyber PR* dianggap sudah cukup eksis, karena dengan adanya *cyber PR* pemerintah daerah kabupaten Karawang menjadikannya sebagai pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini benar-benar menjadikan sesuatu secara *online*. Disamping itu eksistensi *cyber PR* di pemerintah daerah kabupaten Karawang dapat dilihat dari *performa* / hasil kerja dari para pegawai terutama pada staf bagian humas.